

Sinergitas Kelembagaan dan Maritime Domain Awareness di Indonesia: Analisis Dokumen BAKAMLA, KPLP, dan POLAIRUD dalam Pencegahan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Perairan Karimun Besar

Ahmad Ari Syahputra Pulungan¹, Yusnaldi², Budiman Djoko Said³

^{1,2,3}Maritim Security Study Program, Faculty of National Security, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Salemba

E-mail: ahmad.pulungan@kn.idu.ac.id

Article History:

Received: 24 Oktober 2025

Revised: 20 November 2025

Accepted: 05 Desember 2025

Keywords: *Keamanan*

Maritim, Sinergitas

Kelembagaan, BAKAMLA,

KPLP, POLAIRUD

Abstract: *Tata kelola keamanan maritim Indonesia menghadapi tantangan serius akibat tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga utama penegak hukum laut seperti BAKAMLA, KPLP, dan POLAIRUD. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergitas kelembagaan ketiga instansi tersebut dalam pencegahan eksploitasi sumber daya alam di perairan strategis Pulau Karimun Besar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dan triangulasi dokumen yang mencakup regulasi hukum, laporan kelembagaan, serta literatur akademik. Hasil menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga belum optimal karena inkonsistensi mandat hukum, duplikasi kewenangan, dan lemahnya integrasi teknologi informasi untuk pertukaran data. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kerangka koordinasi keamanan maritim nasional berbasis sistem Maritime Domain Awareness (MDA) terpadu guna memperkuat deteksi dan koordinasi operasi maritim.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi ini menjadikan keamanan maritim sebagai pilar utama dalam mempertahankan kedaulatan nasional. Salah satu wilayah maritim strategis adalah Pulau Karimun Besar di Selat Malaka, yang dikenal sebagai jalur pelayaran tersibuk di dunia. Namun, kawasan ini menghadapi ancaman keamanan non-tradisional seperti penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Fenomena tersebut menuntut tata kelola keamanan laut yang lebih terintegrasi dan berbasis sinergitas kelembagaan.

Kelemahan koordinasi antar lembaga maritim seperti BAKAMLA, KPLP, dan POLAIRUD sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan duplikasi operasi di lapangan. Kondisi ini menghambat efektivitas penegakan hukum laut dan menurunkan tingkat Maritime Domain Awareness (MDA). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas

kelembagaan antar ketiga institusi tersebut berdasarkan dokumen hukum, kelembagaan, dan literatur akademik, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan tata kelola keamanan maritim nasional.

LANDASAN TEORI

1. Teori Keamanan Maritim

Bueger (2015) mendefinisikan keamanan maritim sebagai upaya menjaga ketertiban, keselamatan, dan kedaulatan di wilayah laut yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam konteks Indonesia, konsep ini beririsan dengan visi Poros Maritim Dunia yang menuntut sinergi antar lembaga maritim.

2. Sinergitas Kelembagaan

Menurut Sitorus dan Said (2023), sinergitas kelembagaan merupakan kolaborasi antar instansi yang memiliki mandat berbeda namun tujuan sama, yaitu menjaga keamanan laut. Laksamana (2022) menekankan bahwa kelemahan koordinasi sering bersumber dari struktur birokrasi sektoral yang belum terintegrasi secara hukum maupun teknologi informasi.

3. Maritime Domain Awareness (MDA)

Bateman (2016) menjelaskan bahwa MDA adalah sistem kesadaran situasional yang memungkinkan negara memantau seluruh aktivitas maritim secara real-time melalui integrasi data lintas lembaga. MDA menjadi kunci utama dalam membangun sistem keamanan maritim berbasis informasi.

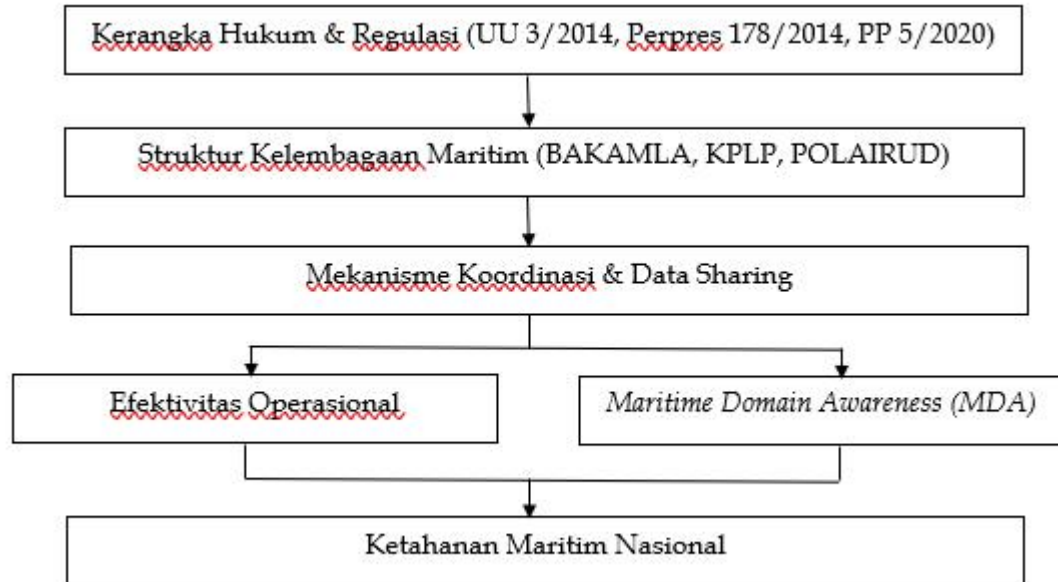
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen dan triangulasi.

Data dikumpulkan dari tiga kategori utama:

1. Dokumen hukum, seperti UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA, dan PP No. 5 Tahun 2020 tentang KPLP;
2. Dokumen kelembagaan, seperti Renstra, SOP patroli, laporan operasional, dan publikasi resmi lembaga;
3. Literatur akademik, termasuk jurnal terindeks Scopus dan publikasi resmi BAKAMLA, Kemenhub, serta POLRI.

Analisis dilakukan melalui empat tahap: reduksi data, penyajian data, triangulasi antar sumber, dan interpretasi hasil untuk mengidentifikasi kesenjangan mandat kelembagaan serta strategi peningkatan sinergi. Berisi mengenai jenis, metode, teknik analisa dll yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketiga lembaga utama keamanan laut Indonesia memiliki fungsi berbeda:

- BAKAMLA: Koordinatif dan pengendalian operasi keamanan laut;
- KPLP: Keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut;
- POLAIRUD: Penegakan hukum pidana di laut.

Namun, belum terdapat mekanisme komando terpadu yang mengatur pembagian wewenang operasional. Perbedaan sistem informasi seperti MSIS (BAKAMLA), VTS (KPLP), dan Police Marine System (POLAIRUD) menyebabkan lemahnya integrasi data.

Hasil analisis SWOT menunjukkan:

Aspek	Temuan Utama
Strength	Jaringan MDA BAKAMLA dan kemampuan lapangan POLAIRUD
Weakness	Duplikasi patroli dan rendahnya interoperabilitas data
Opportunity	Transformasi digital, kerja sama ReCAAP, dukungan visi Poros Maritim Dunia
Threat	Peningkatan kejahatan biru seperti penyelundupan dan illegal fishing

Penelitian ini merekomendasikan pembentukan National Maritime Security Coordination Framework (NMSCF) yang mengintegrasikan sistem MDA lintas lembaga, standarisasi SOP patroli, dan pendirian Joint Maritime Operation Center (JMOC).

KESIMPULAN

Sinergitas kelembagaan antara BAKAMLA, KPLP, dan POLAIRUD belum optimal akibat tumpang tindih mandat hukum, lemahnya sistem informasi, dan duplikasi operasi.

Untuk mengatasinya, diperlukan:

1. Integrasi MDA nasional untuk berbagi data secara real-time;
2. Standardisasi SOP patroli dan penyidikan lintas yurisdiksi;
3. Pembentukan JMOC di wilayah strategis seperti Karimun Besar.

Langkah ini diharapkan memperkuat efektivitas pengawasan laut serta ketahanan maritim nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Afriansyah, A., Imanuel, C., & Darmawan, A. R. (2024). BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard: Challenges and policy direction. *Politics and Governance*, 12(2), 145–158.
- Bateman, S. (2016). Maritime security governance in the Indian Ocean region. *Journal of the Indian Ocean Region*, 12(1), 5–23.
- Beckman, R. (2019). Ocean governance and the rule of law in Southeast Asia. *Ocean Development & International Law*, 50(2), 121–145.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164.
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2020). Blue crime: Conceptualising transnational organised crime at sea. *Marine Policy*, 119, 104067.
- Laksamana, E. A. (2022). Remodelling Indonesia's maritime law enforcement architecture: Theoretical and policy considerations. *Contemporary Southeast Asia*, 44(1), 122–149.
- Popescu, G., & Gasparotti, C. (2022). SWOT–AHP hybrid method for ranking the strategies in the shipbuilding sector. *Journal of Business Economics and Management*, 23(3), 706–730.
- Sitorus, H. F., & Said, B. D. (2023). Synergy among the Indonesian maritime security institutions in conducting maritime patrol. *Jurnal Pertahanan*, 9(1), 30–41.
- Winarno, B., & Yusciantoro, P. (2021). The role of Indonesian maritime security agencies in safeguarding national interest. *Maritime Affairs*, 17(2), 165–180.
- Yuniarto, P., Santosa, B., & Nugroho, S. (2019). Combining SWOT and AHP for strategic planning in maritime security. *International Journal of Industrial Engineering and Management*, 10(3), 175–184.